

Judul : Ketika Jalur Mandiri Menjadi Celah untuk Korupsi
Tanggal : Senin, 24 Agustus 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

PERGURUAN TINGGI

Ketika Jalur Mandiri Menjadi Celah untuk Korupsi

Ester Lince Napitupulu

Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Forum Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN) tengah berdiskusi untuk memperkuat budaya integritas di perguruan tinggi, 19-20 Agustus 2026, di Jakarta. Ironisnya, di tengah upaya itu, Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Aldamad Sodik dan sejumlah pihak justru ditangkap tangan KPK di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (20/8/2026).

Operasi tangkap tangan (OTT) itu diduga terkait suap penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di Unsoed. Menurut hasil penyelidikan sementara KPK, sedikitnya tiga fakultas diduga memperjualbelikan kuota jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru. Praktik transaksional itu ditengarai telah berlangsung sebelum 2025.

Dalam OTT itu, KPK menyita uang Rp 665 juta dan saldo rekening Rp 99 juta yang diduga berasal dari orangtua calon mahasiswa. Kasus ini mencoreng upaya pemberantasan korupsi di lembaga pendidikan tinggi.

Terlebih, kasus jual beli kursi mahasiswa baru, terutama melalui jalur mandiri yang pengelolannya menjadi kewenangan setiap PTN, terus berulang. Kondisi ini memprihatinkan dan mencederai kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi.

Dikutip dari laman KPK, pertemuan Forum PIEPTN menghasilkan tujuh rekomendasi, salah satunya pe-

nguatan sistem antimanipulasi penerimaan mahasiswa baru (PMB), terutama melalui jalur mandiri. Forum mendorong penerapan praktik baik untuk meningkatkan transparansi dan mempersempit ruang intervensi. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses seleksi mahasiswa.

Sejak Forum PIEPTN dibentuk, KPK bersama perguruan tinggi telah memetakan 12 area risiko korupsi dan delapan perangkat antikorupsi. PMB menjadi salah satu area berisiko tersebut.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri-Indonesia Eduart Wolok mengatakan, para rektor sangat prihatin kasus serupa kembali terjadi di lingkungan pendidikan tinggi. Penerimaan mahasiswa baru, yang menjadi salah satu pintu awal penegakan integritas dan marwah perguruan tinggi, seharusnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Ia mengingatkan publik agar tidak menggeneralisasi kasus tersebut sebagai gambaran semua perguruan tinggi. Menurut dia, kasus di Unsoed merupakan dugaan kecurangan yang dilakukan individu di lingkungan rektorat.

"Kalau ditanya soal celah di jalur mandiri, potensi dan godaan untuk itu ada dan itu hampir ada di semua PTN. Tinggal kembali ke penyeleenggara, mau menyelenggarakan ini dengan integritas apa tidak," ujarnya.

Perlu pembenahan

Panitia Kerja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Pan-

ja SPMB) Komisi X DPR merekomendasikan peningkatan transparansi kuota dan mekanisme seleksi. Dalam laporan yang dikutip dari akun Instagram Komisi X DPR, pemerintah didorong menetapkan standar nasional minimum untuk seleksi mandiri yang mencakup transparansi kuota, biaya, dan sistem penilaian.

Panja SPMB Komisi X DPR juga menemukan persoalan dalam penetapan besaran iuran pengembangan institusi/sumbangan pengembangan institusi pada seleksi mandiri. Besarannya dinilai belum berkeadilan dan berpotensi mendorong komersialisasi pendidikan.

Oleh karena itu, Komisi X DPR mendorong penerimaan mahasiswa baru yang adil, transparan, dan bermutu guna menjamin akses pendidikan tinggi yang setara.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan, program PIEPTN menjadi instrumen mengukur sekaligus memperkuat tata kelola dan integritas perguruan tinggi. Ia mengibaratkan PIEPTN sebagai pemeriksaan kesehatan bagi perguruan tinggi.

"Kampus secara sukarela memeriksa tata kelolanya untuk sudah baik dan yang masih perlu diperbaiki," kata Ibnu.

Ia menambahkan, penguatan pendidikan dan pencegahan korupsi di perguruan tinggi dapat berdampak besar dalam menekan tindak pidana korupsi di masa depan. Perguruan tinggi memiliki peran strategis karena pimpinan kampus dapat menggerakkan semua sivitas akademika un-

tuk menjunjung integritas.

Sementara Direktur Jejaring Pendidikan KPK Dan Novianthi mengatakan, PIEPTN digagas pada 2022 atas inisiatif pimpinan PTN yang mendatangi KPK. Mereka membahas langkah bersama merespons persoalan integritas di pendidikan tinggi, termasuk korupsi yang melibatkan pimpinan kampus.

Pada 2025, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yulianto bersama KPK telah menyepakati penguatan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi melalui mata kuliah wajib kurikulum. Langkah ini ditujukan untuk mencegah korupsi sekaligus membangun generasi yang berintegritas.

Saat itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menegaskan, pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya menasar mahasiswa. Nilai dan praktik antikorupsi juga perlu diperkuat di kalangan dosen, tenaga kependidikan, hingga jajaran pimpinan perguruan tinggi.

Terkait dugaan korupsi yang dilakukan Rektor Unsoed, Brian melalui siaran pers mengatakan, integritas merupakan fondasi utama perguruan tinggi. "Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab," ucapnya.

Perguruan tinggi memikul tanggung jawab besar menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan hukum pun harus dijunjung tinggi.